

# Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



menyampaikan bahwa LCDI menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari RPJMN 2020-2024. Beliau menambahkan bahwa terdapat dua hal yang menjadikan Pembangunan Rendah Karbon menjadi keharusan untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pertama, LCDI diharapkan bisa menjadi *win-win solution* bagi pembangunan ekonomi dan lingkungan. Kedua, LCDI diharapkan bisa menjawab isu pada tiga pilar SDGs, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial. “Buku yang diluncurkan pada hari ini adalah awal dari sebuah ide, namun ‘Implementation is above everything’. Implementasi harus menjadi tulang punggung, dan kita harapkan buku ini tidak hanya menjadi karya akademik, namun juga menjadi pegangan untuk membawa pembangunan Indonesia yang berkelanjutan” ujarnya.

Beberapa kisah sukses pelaksanaan ICCTF dalam implementasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) misalnya di Kabupaten Kupang dan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur melalui pengembangan sistem budidaya padi SRI (*System of Rice Intensification*) sebagai alternatif produksi pertanian ramah lingkungan. Intervensi yang dimulai sejak tahun 2016 ini berhasil meningkatkan produktivitas padi hingga 200%. Program ini menjadi upaya menstabilkan produksi padi di Indonesia dengan pengelolaan tanaman yang adaptif, sehingga disamping meningkatkan perekonomian petani, juga sekaligus menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).



Jakarta - Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) mendukung kegiatan Peluncuran Laporan Kajian Pembangunan Rendah Karbon Indonesia yang diselenggarakan pada 26 Maret 2019 di Bappenas. Kegiatan ini dihadiri sekitar 350 peserta dari berbagai instansi pemerintah, organisasi hingga media massa termasuk juga duta besar dan pejabat tinggi dari berbagai instansi, antara lain Duta Besar Denmark, Duta Besar Inggris, Duta Besar Norwegia, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim.

Dalam kegiatan ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas menyampaikan bahwa dalam periode 50 tahun terakhir, Indonesia mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan di sektor lingkungan seperti polusi udara dan air, penyusutan hutan, urbanisasi yang tidak teratur, berkurangnya sumber daya alam, serta perubahan iklim dan dampaknya. Indonesia juga masih menjadi salah satu negara penghasil Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar di dunia. Tanpa adanya

kebijakan Pembangunan Rendah Karbon, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan hingga 4,3% pada tahun 2045. Namun, dengan adanya intervensi kebijakan rendah karbon diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat secara bertahap hingga 5,7% pada tahun 2045.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas juga menekankan bahwa Indonesia harus beralih dari model ekonomi *Business As Usual* ke pola inovatif dan berkelanjutan. Dalam kerangka Pembangunan Rendah Karbon, terdapat 5 kebijakan utama sebagai strategi untuk mewujudkan visi pembangunan rendah karbon, yakni:

1. Transisi Menuju Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi;
2. Perlindungan Hutan, Moratorium Gambut dan Meningkatkan Reforestasi;
3. Penanganan Sampah dan Pengelolaan Industri;
4. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian;
5. Perbaikan Kelembagaan dan Tata Kelola.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pidato kuncinya



# SDGs Corner

ICCTF mendukung Sekretariat SDGs dalam melaksanakan kegiatan SDGs Corner pada tanggal 28 Februari 2019 di Bappenas. Kegiatan tersebut diikuti oleh 200 peserta dan menghadirkan 9 booth pameran. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat hubungan kerjasama dan komunikasi antar pemangku kepentingan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia serta saling berbagi informasi antar pemangku kepentingan terkait pelaksanaan SDGs. Dimulai dengan acara konsultasi publik 4 pilar pembangunan SDGs, kegiatan dilanjutkan dengan acara *talkshow best practice* pelaksanaan SDGs. Sesi *talkshow* ini membahas 4 topik pembelajaran utama SDGs yaitu: Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan serta Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Secara paralel, diselenggarakan juga pameran yang diikuti oleh 9 lembaga yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, MM Sustainability Universitas Trisakti, Filantropi Indonesia, ICCTF, SDGs, 2030 Youth Force Indonesia, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, Institut Kapal Perempuan, dan Pemerintah Provinsi Banten. Dengan antusias para peserta yang hadir, diharapkan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs dapat saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai target SDGs Tahun 2030.



## Rangkaian Kegiatan ICCTF Triwulan 1 2019

Waktu	Kegiatan	Lokasi
24-26 Januari	<i>Programmatic Monev</i> : "Implementasi 3R Program Restorasi Gambut pada Blok A dan E eks Proyek Lahan Gambut (PLG)" – P2KLH	Kalimantan Tengah
22 Januari	Penyelenggaraan <i>Steering Committee Meeting</i> Hibah Global Environment Facility (GEF) World Bank	Jakarta
28 Januari – 22 Februari	<i>Implementation Support Mission</i> terhadap program COREMAP-CTI Loan IBRD 83360 dan Grant TF015470	Jakarta
13 Februari	<i>Inception Meeting</i> ICCTF bersama Bappenas, DOEE (Department of the Environment and Energy), dan CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) Australia	Jakarta
14-15 Februari	<i>Technical Scoping Meeting</i> ICCTF bersama Bappenas: Pemaparan " <i>Blue Carbon National Policy in Indonesia</i> "	Bali
21 Februari	Penyesuaian Proposal restrukturisasi Hibah Global Environment Facility Asian Development Bank	Jakarta
25-26 Februari	<i>Workshop Monitoring</i> dan Evaluasi Tahunan	Jakarta
28 Februari	Konsultasi Publik KLHS RPJMN 2020 – 2024	Jakarta
28 Februari	<i>Sustainable Development Goals Corner</i>	Jakarta
8 Maret	<i>Joint Review</i> Dokumen ESSF antara ICCTF, LIPI, KKP dan World Bank	Jakarta
10-12 Maret	<i>Financial Spot Check</i> : "Konservasi Ekosistem Nipah dan Kawasan Hutan Bergambut Penyangga Suaka Margasatwa Lamandau Sebagai Kawasan Hutan Masyarakat (HKm) dan Penyerap Karbon" - Yayorin	Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
10-13 Maret	<i>Programmatic Monev</i> : "Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Peningkatan Peran Serta Para Pihak dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologi Gambut antara Sungai Siak dan Sungai Kampar" – Konsorsium Mitra Insani	Riau
11 Maret	Diskusi Tri Hita Karana: Pemaparan Inisiatif <i>Blended Financing</i> di Bidang Konservasi Kelautan di Indonesia oleh Bappenas	Jakarta
14-16 Maret	<i>Programmatic Monev &amp; Financial Spot Check</i> : "Restorasi dan Akselerasi Integritas Ekologi Hutan Pantai ( <i>Beach Forest</i> ) dan Pesisir di Wilayah Teluk Saleh" - Terangi	Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
14-17 Maret	<i>Financial Spot Check</i> : "Implementasi 3R Program Restorasi Gambut pada Blok A dan E eks Proyek Lahan Gambut (PLG)" – P2KLH	Kalimantan Tengah
14 Maret	Pertemuan dengan Coastal Resource Center (CRC), University of Rhodes Island	Jakarta
28-30 Maret	<i>Financial Spot Check</i> : Pembasahan dan Pencegahan Kebakaran Pada Lahan Gambut - UNKRIP	Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Maret	Fasilitasi Rencana Dukungan Penyusunan Studi Kelayakan ( <i>Feasibility Study</i> ) PLT Sampah	Bali dan Nusa Tenggara Timur



## ICCTF Dukung Kegiatan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)



dan Rendah Karbon 2020-2024 untuk memastikan prinsip keberlanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana dan program.

Saat ini, pembangunan di Indonesia masih mengikuti pola pembangunan masa lalu. Diperlukan adanya lompatan kebijakan untuk memenuhi target-target pembangunan ekonomi hijau. Dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Sumber Daya Alam dalam pembangunan, diharapkan strategi investasi rendah karbon dapat diintegrasikan dalam RPJMN 2020-2024 dan *Roadmap* SDG 2030. Dengan demikian, Indonesia dapat menurunkan intensitas emisi dan emisi GRK, sekaligus secara bersamaan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun data biodiversitas Indonesia bagian timur masih sulit diperoleh, namun saat ini sudah ada pendekatan alternatif metode menggunakan *Key Biodiversity Areas* (KBA). Diharapkan kerja sama multi-pihak untuk turut melengkapi dan menyempurnakan data, informasi, dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini.

**Jakarta** - Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Lingkungan Hidup menyelenggarakan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 di Hotel Mandarin Oriental Jakarta pada 28 Februari 2019. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, akademisi, mitra pembangunan, dan NGO. Konsultasi publik KLHS bertujuan untuk menghimpun masukan dan tanggapan dari berbagai pakar dan peserta yang hadir terhadap hasil analisis dan kajian yang telah disusun.

Pada pembukaan kegiatan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Bappenas menyampaikan bahwa KLHS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam merubah paradigma perencanaan silo menjadi "*Integrated Planning*". KLHS memiliki keterkaitan dengan Pembangunan Rendah Karbon (PRK), dimana daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan menjadi faktor penentu dalam perumusan kebijakan dan target PRK.

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis disampaikan oleh Direktur Lingkungan Hidup termasuk metodologi dan penyamaan persepsi terkait proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS akan menjadi masukan dalam proses penyusunan RPJMN Hijau

## Partisipasi dalam UN-PAGE Ministerial Conference, Cape Town

Delegasi Kementerian PPN/Bappenas dan ICCTF menghadiri *Ministerial Conference* pada 10 Januari 2019 di Cape Town, Afrika Selatan. Kehadiran Kementerian PPN/Bappenas dan ICCTF sekaligus menjadi representasi Indonesia sebagai negara mitra baru United Nations Partnership for Action on Green Economy (UN PAGE).

Partnership for Action on Green Economy (PAGE) merupakan respon terhadap agenda Rio+20, di mana lima lembaga UN bekerja sama untuk membantu negara dalam proses transisi menuju *green economy*, serta memastikan koherensi program dan menghindari duplikasi. PAGE memberikan dukungan terhadap koordinasi kebijakan yang lebih baik, mengidentifikasi faktor pendukung potensial untuk reformasi sektor industri, serta peningkatan kapasitas.

Transisi menuju *green economy* dan pembangunan rendah karbon sangat signifikan untuk merespon perubahan dan mengatasi tantangan pembangunan saat ini sehingga penting untuk dilaksanakan secara inklusif dan didukung oleh struktur politik, ekonomi, serta pelestarian

lingkungan. Harapannya, transisi menuju *green economy* dapat memberikan peluang dan kesempatan lapangan kerja baru. *Green growth* perlu didukung oleh *practical learning* dan inovasi, sehingga pendekatan yang harus dilakukan adalah inklusif dan tidak lagi *business as usual*.

Tak hanya itu diperlukan kepemimpinan (*leadership*), kolaborasi, dan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan agar berbagai peluang dalam proses transisi menuju *green economy*, khususnya pada sektor dunia usaha dan tenaga kerja dapat dikelola dengan baik.



## Monitoring dan Evaluasi Program Indonesia Climate Change Trust Fund Bersama Tim Evaluation Management Unit (EMU) UK Climate Change Unit

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari *monitoring* dan evaluasi oleh Evaluation Management Unit (EMU) dan United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU) atas capaian dan dampak program selama tahun 2018. Dalam kegiatan ini, tim EMU memberikan penilaian terhadap keseluruhan kemajuan program ICCTF dalam kerangka FLAG selama tahun 2018 serta identifikasi tindakan perbaikan.

Hasil dari *monitoring* dan evaluasi ini menunjukkan adanya beberapa kemajuan,

seperti: (1) peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola pertanian tanpa membakar dan menjaga lahan gambut; (2) upaya *scaling up* melalui publikasi mini demplot di wilayah intervensi ICCTF ke dalam Laporan Inovasi Desa; (3) Komitmen pemerintah desa melalui penggunaan Anggaran Desa untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; (4) peningkatan komitmen kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Siak dan Pelalawan tahun 2016-2018 terhadap perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Salah satu mitra pelaksana ICCTF menyampaikan bahwa kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan, telah menyelamatkan lebih dari lima juta ton *carbon stock*. Dari aspek perekonomian, tercatat adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pembangunan ekowisata *mangrove* dan pengembangan pertanian dengan pola agroforestri di lahan gambut.

Upaya replikasi dan keberlanjutan yang telah dilakukan yakni (1) Pembibitan tanaman hutan telah direplikasi di wilayah lain, salah satunya adalah Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti; (2) Penguatan kelembagaan dan membangun portal Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Siak – Sungai Kampar sebagai salah satu alat komunikasi (3) Pemetaan hutan adat sebagai bagian dari pengusulan hutan adat; (4) Komitmen pemeliharaan sekat kanal dan pengelolaan ekowisata bersama dengan Badan Pengawas Kampung (Bapekam).

Dalam rangkaian kegiatan evaluasi ini, tim ICCTF, EMU, dan mitra pelaksana juga menyelenggarakan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar. Secara umum, Syamsuar antusias dan mengapresiasi kerja pihak-pihak yang fokus dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

# Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan di Indonesia

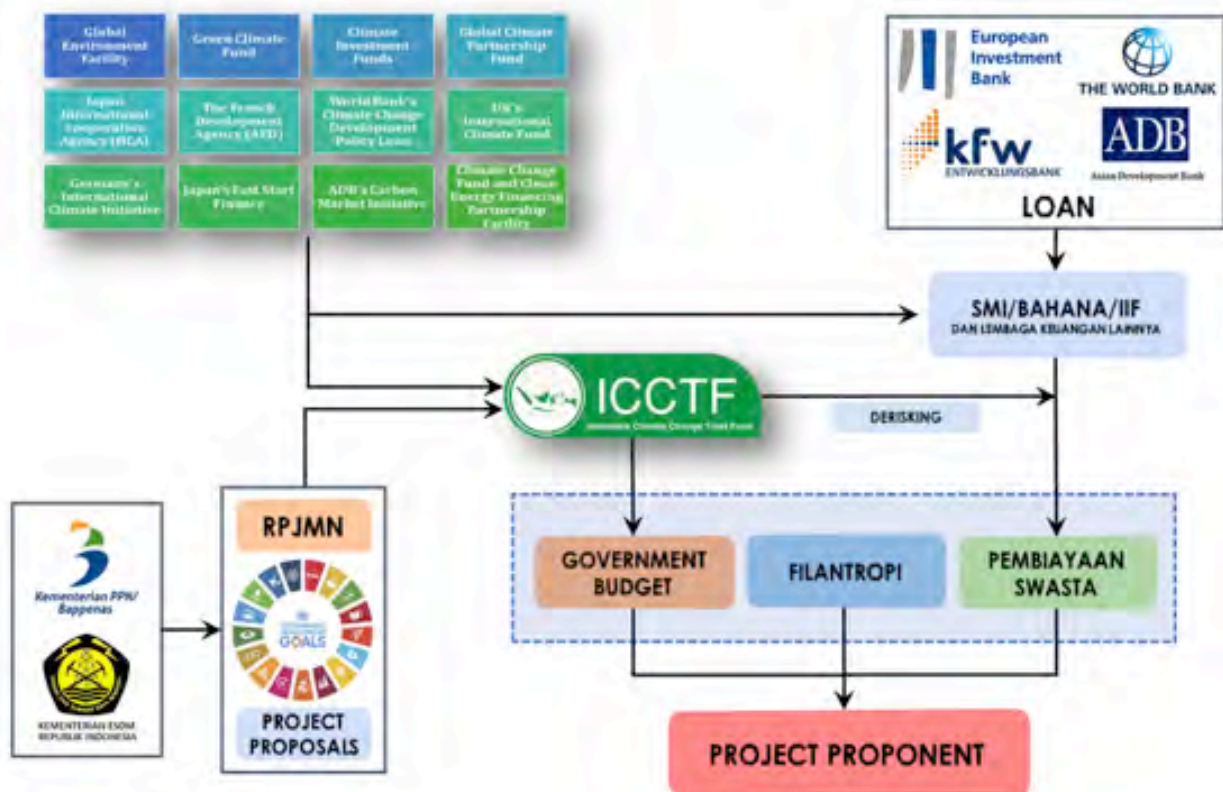
Pokja Energi ICCTF telah dibentuk pada akhir 2018 dan telah mulai memfasilitasi percepatan pembangunan energi terbarukan di Indonesia. Beberapa kegiatan yang telah terlaksana antara lain Penyusunan Buku *List of Renewable Energy Project* hingga pertemuan kerja sama dengan European Investment Bank (EIB) terkait penawaran *soft loan* untuk pembiayaan proyek energi terbarukan dengan dana sekitar 100 juta Euro. Rencananya pinjaman ini akan disalurkan melalui skema *framework loan* melalui *channeling entity* atau *two-step-loan*.

Dalam hal ini, EIB mensyaratkan *channeling entity* harus merupakan badan usaha

atau lembaga keuangan milik negara. Mengkoordinasikan dan mencari badan usaha atau lembaga keuangan yang cocok dan bersedia menjadi *channeling entity* untuk kerja sama ini adalah salah satu tugas Pokja Energi ICCTF. Keterbatasan regulasi, serta skema *framework loan* yang ditawarkan dinilai tidak menarik dan berpotensi merugikan badan usaha/ lembaga keuangan yang telah dijajaki. Beberapa kegiatan lain dari Pokja Energi antara lain koordinasi dengan Global Green Growth Institute (GGGI) untuk membantu *technical assistance* penguatan kualitas studi kelayakan PLTSa di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah.

Pada Februari lalu, Pokja Energi juga memfasilitasi rencana pembangunan PLT Surya di Kabupaten Malinau (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi) dengan dana investasi dari Shizen Energy Jepang.

Sementara pada bulan Maret 2019, Pokja Energi melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Clean Power Indonesia (CPI) dan GGGI untuk mendiskusikan penyusunan studi kelayakan PLT Sampah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur.





## Pokja Kelautan dan Perikanan

Pokja Kelautan dan Perikanan ICCTF dibentuk pada tahun 2018 dan memiliki tugas mendukung MWA ICCTF pada bidang program dan kegiatan yang strategis dan inovatif untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sektor kelautan dan perikanan. Dalam periode triwulan pertama di tahun 2019, Pokja III telah bekerja secara intensif meliputi kegiatan: perencanaan program COREMAP-CTI, persiapan inisiatif Blended Financing pada ekosistem pesisir dan persiapan kegiatan bidang Blue Carbon.

## Persiapan Program COREMAP-CTI

Pada Januari 2019, usulan restrukturisasi untuk program COREMAP-CTI yang didanai hibah GEF World Bank telah menerima dukungan dari CEO/ Chairperson GEF. Setelahnya, Pokja Perikanan dan Kelautan melanjutkan proses restrukturisasi dengan menyelenggarakan *Steering Committee Meeting* pertama pada 22 Januari 2019 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-2, Bappenas. Pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Pada 8 Maret 2019, dilaksanakan *Joint Review* dokumen ESSF antara ICCTF, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan World Bank yang bertujuan untuk menyesuaikan dokumen dengan perkembangan kondisi proyek terbaru serta tambahan yang relevan dengan kegiatan perlindungan dan sosial.



# Inisiasi Program Blue-Carbon



Kementerian PPN/Bappenas telah menginisiasi isu *blue carbon* sejak tahun 2017 yang menghasilkan Kerangka Kerja dan Strategi Pengembangan Karbon Biru Indonesia (*Indonesia Blue Carbon Strategy Framework*). Awal tahun 2019 Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2040 telah selesai disusun dan isu *blue carbon* turut disertakan dalam Program Prioritas (PP): Pembangunan Rendah Karbon. Dalam Program Prioritas ini mengedepankan Kegiatan Prioritas yang terkait dengan inventarisasi dan rehabilitasi *mangrove* dan padang lamun.

“Ekosistem pesisir seperti *mangrove*, padang lamun, dan kawasan rawa payau merupakan ekosistem penyerap dan penyimpan karbon alami dalam jumlah

besar dan waktu lama. Karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir ini dikenal sebagai Karbon Biru atau *Blue Carbon*.” Pada 13 Februari 2019 Pokja Kelautan dan Perikanan berpartisipasi dalam *inception meeting* antara pihak ICCTF-Bappenas dengan perwakilan Department of the Environment and Energy (DOEE) dan Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Australia. Pertemuan ini membahas langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan antara pemerintah Indonesia, khususnya Bappenas dengan Australia. Pertemuan kerjasama ini berlanjut dengan berbagi informasi dan pengetahuan terkini mengenai *blue carbon* di Indonesia dan Australia sekaligus membangun kemitraan dalam acara *Technical Scoping Meeting*



yang bertempat di kantor Coral Triangle Center, Sanur, Bali pada 14-15 Februari 2019.

Dalam kegiatan ini perwakilan ICCTF memaparkan bahan mengenai "*Blue Carbon National Policy in Indonesia*". Selain perwakilan ICCTF hadir pula perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, akademisi serta NGO nasional dan internasional.

Tak hanya itu, pada 14 Maret 2019 ICCTF berpartisipasi dalam pertemuan dengan Professor John P. Walsh selaku Direktur Coastal Resource Center, University of Rhodes Island yang memaparkan mengenai "*Professional Short Course, The Leadership for Blue Carbon in Indonesia*" di kantor Bappenas. Sebelumnya pada September 2018, sejumlah perwakilan dari Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan tersebut.

Pertemuan dibuka dengan sambutan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas dan dilanjutkan pemaparan materi oleh Kasubdit Tata Kelola Pesisir, Bappenas dengan tema "*Marine and Blue Carbon Development in Indonesia, 2020-2024*" dan pemaparan peneliti P2O LIPI dengan tema "*Current Status on Seagrass and Carbon Research in Indonesia*". Kegiatan ini tentunya menjadi peluang kerjasama antara Indonesia dan Amerika untuk mendiskusikan kerjasama di masa mendatang.

# Blended Financing



Pemerintah Indonesia saat ini sedang menerapkan metode *Blended Financing* yang merupakan skema pendanaan campuran yang berasal dari publik maupun filantropis yang digunakan untuk memacu investasi dalam rangka mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada 11 Maret 2019 dalam acara diskusi Tri Hita Karana di Jakarta, Menteri PPN/Bappenas memberikan paparan mengenai rencana penerapan inisiatif *Blended Financing* di bidang konservasi kelautan di Indonesia.

Dalam pertemuan skala internasional ini, Menteri PPN/Bappenas menekankan pentingnya menjaga konservasi keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Oleh sebab itu, Menteri PPN/Bappenas menghimbau kerjasama antara pemerintah,

pihak filantropis, sektor swasta dan komunitas dalam penerapan skema *Blended Financing*. Bekerjasama dengan RARE, Bappenas berencana akan melaksanakan *pilot projects Blended Financing* di beberapa titik lokasi di Indonesia.

Tri Hita Karana terbentuk dari tiga kata, yaitu Tri artinya tiga, Hita artinya kebahagiaan atau sejahtera, Karana artinya sebab atau penyebab. Jadi Tri Hita Karana mempunyai arti tiga penyebab kebahagiaan.

Sumber-sumber kebahagiaan tersebut dalam ajaran Hindu bersumber dari tiga keharmonisan, yaitu parhyangan (manusia dengan Tuhan), palemahan (manusia dengan alam lingkungan), dan pawongan (manusia dengan sesama).





**SUPPORTING  
THE INDONESIAN  
GOVERNMENT  
FOR A BETTER CLIMATE**



**ICCTF**

Indonesia Climate Change Trust Fund

[www.icctf.or.id](http://www.icctf.or.id)

 ICCTF\_ID 
  icctfofficial 
  ICCTF

 Indonesia Climate Change Trust Fund

**Sekretariat ICCTF**

Gedung Lippo Kuningan, Lt.15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12

Jakarta 12940, Indonesia

E. [secretariat@icctf.or.id](mailto:secretariat@icctf.or.id)

T. +62 (21) 8067 9314

F. +62 (21) 8067 9315